

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERSYARATAN, TUGAS, WEWENANG,
DAN KEWAJIBAN DIREKTUR KEPATUHAN
PIALANG BERJANGKA

Formulir Nomor: I.DK.1

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan
Calon/Calon Pengganti
Direktur Kepatuhan
Pialang Berjangka. *)

Kepada Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan/calon Direktur Kepatuhan Pengganti. *)

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor I.DK.1.A sampai dengan Formulir I.DK.1.D yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Sehubungan dengan permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan Pengganti, sekaligus kami mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Direktur Kepatuhan yang Lama. Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan alasan kami melakukan pemberhentian Direktur Kepatuhan sebagai berikut: **)

1.;
2.; dan
3.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama

PT.

Nama Jelas & Tanda Tangan

*) Pilih salah satu

**) Paragraf ini khusus pengajuan calon Direktur Kepatuhan Pengganti

Formulir Nomor: I.DK.1.A

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
CALON DIREKTUR KEPATUHAN

CATATAN

1. Bacalah pertanyaan dan penjelasannya secara teliti sebelum mengisi formulir daftar isian ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh calon Direktur Kepatuhan.
2. Daftar isian ini harus ditandatangani oleh calon Direktur Kepatuhan.

I. Data Calon Direktur Kepatuhan

1. a. Nama :
- b. Nama alias yang digunakan :
 dan lebih dikenal
2. Jabatan :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Warga Negara/Kebangsaan :
6. No. KTP/Paspor *) :
7. Alamat lengkap:
 - a. Rumah :
 - b. Kantor :
8. Nomor Telepon :
- Nomor Faksimili :
- Alamat E-mail :
9. Nomor Pokok Wajib Pajak :
10. Tanda Lulus Ujian Profesi :
 Wakil Pialang

II. Pendidikan dan Kualifikasi Keahlian

Berikan uraian rinci mengenai riwayat pendidikan dan kualifikasi keahlian yang dimiliki serta lampirkan foto copy ijazah dan sertifikatnya.

1. Riwayat Pendidikan

Nama dan Tempat Pendidikan	Jurusan/ Bidang Studi	Tanda Lulus	Tahun

2. Kualifikasi Keahlian

Kualifikasi Keahlian	Institusi Penyelenggara	Tahun

III. Pengalaman Kerja 10 (sepuluh) Tahun Terakhir

Nama dan Alamat Tempat Bekerja	Jabatan	Bidang Pekerjaan	Periode (Bulan/Tahun)		Alasan Berhenti
			Dari	Sampai	

IV. Daftar Pertanyaan

Jawablah dengan “Ya” atau “Tidak”. Apabila dijawab “Ya” berikan penjelasan secara rinci dan lampirkan.

Apakah calon Direktur Kepatuhan pernah/dalam keadaan:	Ya	Tidak
1. memiliki izin atau terdaftar sebagai Wakil Pialang Berjangka di dalam negeri atau luar negeri untuk melaksanakan Perdagangan Berjangka?		
2. diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak perizinannya oleh Bappebti?		
3. pernah dihukum karena terbukti melakukan		

tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?		
4. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka?		
5. dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir?		
6. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal atau perpajakan?		
7. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?		
8. masuk daftar hitam perbankan?		
9. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?		
10. memiliki jabatan rangkap di perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka?		

V. Lampiran

1. Fotokopi Identitas (KTP/Paspor);
2. Fotokopi tanda lulus pendidikan terakhir;
3. Fotokopi Surat Keterangan ganti nama dari Departemen Kehakiman (jika ada);
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. Fotokopi Tanda Lulus Ujian Profesi Wakil Pialang.

VI. Pernyataan

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam daftar isian ini serta lampirannya adalah

benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

.....,

Nama Jelas & Tanda Tangan
Calon Direktur Kepatuhan

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor: I.DK.1.B

SURAT PERNYATAAN

BERMORAL BAIK DAN MAMPU BEKERJA SECARA INDEPENDEN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas :

(KTP/Paspor) *)

NPWP :

Jabatan :

Alamat Lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

.....-

--	--	--	--	--	--

(Kota & Kode Pos)

Nomor Telp/Fax :

Selaku calon Direktur Kepatuhan dari PT. dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
- c. mampu bekerja secara independen.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

meterai

Nama Jelas & Tanda Tangan
Calon Direktur Kepatuhan

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor: I.DK.1.C

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas :
(KTP/Paspor) *)

NPWP :

Jabatan :

Alamat Lengkap :
.....

(Nama Jalan & Nomor)

.....-

--	--	--	--	--

(Kota & Kode Pos)

Nomor Telp./Fax :

Selaku calon Direktur Kepatuhan dari PT. **) beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota direktur/komisaris pada PT. **) dan tidak menangani dan/atau membawahi kegiatan operasional pada PT. **).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

meterai

Nama Jelas & Tanda Tangan
Calon Direktur Kepatuhan

*) Pilih salah satu

**) Diisi nama Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Formulir Nomor: I.DK.1.D

SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas :

(KTP/Paspor) *)

NPWP :

Jabatan :

Alamat Lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

.....-

--	--	--	--	--

(Kota & Kode Pos)

Nomor Telp/Fax :

Selaku calon Direktur Kepatuhan dari PT. beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai*) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direktur/komisaris lainnya dalam perusahaan yaitu Sdr.; Sdr. dan Sdr**)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,

meterai

Nama Jelas & Tanda Tangan
Calon Direktur Kepatuhan

*) Pilih salah satu

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR II.DK.1

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN CALON/CALON PENGGANTI

DIREKTUR KEPATUHAN *)

PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.....
 Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan
 Persetujuan Calon/Calon Pengganti Direktur Kepatuhan
 Pialang Berjangka *);
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT
 telah memenuhi persyaratan secara lengkap
 pada tanggal, dan atas dasar itu
 dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan Calon/Calon
 Pengganti Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka *)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
 Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN CALON/CALON PENGGANTI DIREKTUR KEPATUHAN *) PT.

Pasal 1

Memberikan Persetujuan Calon/Calon Pengganti Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif sebagai Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka*) pada PT

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR II.DK.2

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR KEPATUHAN

PT.

ATAS NAMA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.....
 Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan
 Persetujuan/Calon Pengganti Direktur Kepatuhan Pialang
 Berjangka *);
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT
 telah memenuhi persyaratan secara lengkap
 pada tanggal, dan atas dasar itu
 dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan
 Pemberhentian Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka *)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
 Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR KEPATUHAN PT. ATAS NAMA

Pasal 1

Memberikan Pemberhentian Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka PT dengan alamat.....atas nama Sdr.

Pasal 2

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang diberhentikan terhadap atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR II.DK.3

Nomor : Jakarta,20....
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Permohonan
 Calon Pengganti Direktur Kepatuhan *

Yth.
 di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
 perihal, setelah meneliti
 permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara
 ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR III.DK.1**Laporan bulanan pelaksanaan atas tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan**

Catatan Pengisian

1. Laporan pelaksanaan atas tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan merupakan pedoman minimal yang wajib dilaksanakan dan diisi oleh Direktur Kepatuhan.
2. Direktur Kepatuhan dapat menambah laporan atas tugas dan wewenangnya disesuaikan dengan kegiatan atau keadaan masing-masing Pialang Berjangka.

PT. XYZ

Laporan bulanan atas tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan
Bulan / Tahun:

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
1	Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Pialang Berjangka telah memenuhi seluruh	1. Pemasaran, baik secara konvensional maupun secara elektronik <i>online</i>	Memastikan bahan-bahan pemasaran (<i>marketing materials</i>) yang digunakan telah mematuhi ketentuan		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
	peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait		Memastikan program pemasaran (<i>marketing program</i>) telah mematuhi ketentuan		
			Memastikan bahwa kegiatan pemasaran dilakukan oleh pihak yang sesuai dengan ketentuan		
		2. Penerimaan Nasabah, baik secara konvensional maupun penerimaan Nasabah secara elektronik <i>online</i>	(Berdasarkan dengan Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Perilaku Pialang Berjangka dan Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Penerimaan Nasabah, dan SOP Penerimaan Nasabah yang disusun Pialang Berjangka dan telah disetujui oleh Bappebti)		
		3. Pengelolaan rekening terpisah	Memastikan pengelolaan Rekening Terpisah sesuai dengan Ketentuan		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
			Memantau dan memastikan dana nasabah dikelola pada <i>segregated account</i> dan dana yang ada pada Lembaga Kliring Berjangka jumlahnya lebih besar dari total equity nasabah		
			Memastikan pelaksanaan pencairan dana nasabah sesuai SOP		
		4. Praktek Perdagangan/ Pelaksanaan Transaksi	Memastikan sarana transaksi memadai		
			Memastikan pelaksanaan penyaluran amanat baik transaksi multilateral maupun bilateral telah sesuai dengan ketentuan dan SOP		
			Menyusun jadwal dan format pengawasan internal		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
			Penerapan dan pengawasan kebijakan pelaksanaan transaksi yang telah ditetapkan Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan		
			Memastikan order yang dilakukan selalu didukung oleh margin yang cukup		
		5. Pencatatan dan Pelaporan	<p>Melaporkan kondisi perusahaan yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pelaksanaan transaksi komoditi primer; ▪ aktifitas SDM (WPB, Pengurus Perusahaan); ▪ rencana pembukaan kantor cabang (apabila ada); ▪ aktifitas kantor cabang (apabila ada); ▪ pemenuhan Kewajiban Keuangan Pialang Berjangka: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Harian Dana Nasabah dan <i>equity</i> (via 		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
			web BBJ) - Laporan Modal Bersih Disesuaikan - Kekayaan Bersih - Modal Disetor - Laporan-laporan lain yang berhubungan dengan PTT Bursa Berjangka		
		6. Pemenuhan kewajiban Pialang Berjangka terhadap Peraturan Kepala Bappebti yang baru diterbitkan	Peraturan tentang Pedoman Perilaku Pialang Berjangka (CONTOH)		
			Peraturan tentang Permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) (CONTOH)		
			Peraturan tentang Penggerak Pasar (<i>market maker</i>) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka (CONTOH)		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
			Peraturan lain (sebutkan)		
		7. Pemenuhan Kewajiban Pialang Berjangka dalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU)/Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Membuat kebijakan dan prosedur umum terkait dengan penerapan program APU/PPT yang dibakukan (Diajukan Direktur Utama disetujui Dewan Komisaris)		
			memastikan bahwa penerapan program APU/PPT dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan		
			memastikan bahwa pedoman penerapan program APU/PPT sejalan perubahan dan pengembangan produk, jasa, & teknologi, serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang / Pendanaan Terorisme		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
			Melakukan pemantauan terhadap proses administrasi dari: Verifikasi atas kelas resiko Nasabah selama pembukaan rekening, pembaharuan profil Nasabah.		
			melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme		
			Melakukan pengkinian data secara periodik terkait dengan: Tingkat resiko Nasabah (sesuai dengan <i>Risk Based Approach</i> yang disusun)		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
			Melakukan penilaian secara berkesinambungan atas implementasi penerapan program APU/PPT		
			Membuat dan mengembangkan Sistem Informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyediakan laporan dengan karakteristik transaksi berdasarkan risiko yang dilakukan nasabah		
			Pialang Berjangka wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai		
			Pelatihan internal yang terkait dengan Program APU/PPT		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
2	Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Pialang Berjangka tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku		Melakukan pengawasan internal secara periodik terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pialang Berjangka apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
3	Memantau dan menjaga kepatuhan Pialang Berjangka terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Pialang Berjangka kepada pihak lain	Hak dan kewajiban pialang dalam perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Pialang Berjangka kepada pihak lain	Memeriksa setiap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Wakil Pialang		
			Mereview setiap perjanjian yang ada agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada		
4	Menerima dan menangani pengaduan Nasabah	1. Kelengkapan dokumen penanganan pengaduan nasabah	Membuat SOP Pengaduan Nasabah yang disetujui oleh Bappebti		

No	Tanggung Jawab yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti	Area yang Dipantau	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, Evaluasi)	Keterangan
			Membuat formulir pengaduan		
			Menyediakan sarana penyelesaian pengaduan nasabah		
			Membuat prosedur penyelesaian pengaduan nasabah yang efektif dan efisien		
			Membuat hasil laporan penyelesaian pengaduan nasabah dan melaporkannya kepada Bappebti		
		2. Perkembangan penyelesaian pengaduan (kasus) yang terjadi dan penanganannya	Membuat Rekap daftar Pengaduan Nasabah dan Hasil Penyelesaiannya		
		3. Pengaduan baru yang terjadi dalam kurun waktu bulan berjalan	Membuat Rekap daftar Pengaduan Nasabah baru dalam kurun waktu bulan berjalan		

FORMULIR NOMOR III.DK.2**Laporan Daftar Perkembangan Pengurus Perusahaan****PT. XYZ****Laporan Daftar Perkembangan Pengurus Perusahaan****Bulan / Tahun:**

No.	Jabatan*)	KETERANGAN		
		Nama	No SK	Status
	Dewan Komisaris			
	Komisaris Utama			
	Komisaris 1			
	Komisaris 2			
	Direksi			
	Direktur Utama			
	Direktur Kepatuhan			
	Direktur Operasional			
	Direktur Keuangan			
	...			
	Cabang			
	Kacab. Xxx			
	Kacab. Xxx			
	Kacab. Xxx			
	...			

*) Disesuaikan dengan Jabatan dan Nama Jabatan yang ada pada masing-masing Pialang Berjangka

FORMULIR NOMOR III.DK.3**Laporan Daftar Perkembangan Domisili Kantor Pusat dan Cabang****PT. XYZ****Laporan Daftar Perkembangan Domisili Kantor Pusat dan Cabang****Bulan / Tahun:**

No.	Lokasi	KETERANGAN			
		Alamat		No SK	Status
		Kota	Nama Gedung>Nama Jalan		
	Pusat				
	Cab. xxx				
	Cab. xxx				
	Cab. xxx				
	Cab. xxx				
	Cab. xxx				
	Cab. xxx				
	Cab. xxx				
	Cab. xxx				
				

FORMULIR NOMOR III.DK.5**Laporan Rekapitulasi Perkembangan Posisi Rekening Terpisah****PT. XYZ****Laporan Rekapitulasi Perkembangan Posisi Rekening Terpisah****Bulan / Tahun:**

No.	Bank	No. Rekening	Jenis	Pemegang Spesimen	Jumlah*	
					IDR	USD
TOTAL						0

*Jumlah total margin masuk (margin-in)

FORMULIR NOMOR III.DK.6**Laporan Rekapitulasi Kewajiban Pemenuhan Keuangan**

PT. XYZ
Laporan Rekapitulasi Kewajiban Pemenuhan Keuangan
Bulan / Tahun:

No.	Uraian	Jumlah
1	Modal Disetor	
2	Saldo Modal Akhir	
3	Modal Bersih Disesuaikan	
4	Dana Nasabah	
5	...	
6	...	
TOTAL		0

FORMULIR NOMOR III.DK.8**Laporan Rekapitulasi Komisi Transaksi**

PT. XYZ
Laporan Rekapitulasi Komisi Transaksi
Bulan / Tahun:

No.	Jenis Kontrak			
		Vol (Lot)	Komisi (per Lot)	Total Komisi
1	Kontrak Berjangka	0	0	0
	- ...			
	- ...			
	- ...			
	- ...			
2	Kontrak Derivatif Lainnya	0	0	0
	SPA	0	0	0
	- ...			
	- ...			
	- ...			
	- ...			
	- ...			
	PALN	0	0	0
	- ...			
	TOTAL	0	0	0

FORMULIR NOMOR III.DK.9**Laporan Perkembangan Profil Penerimaan Nasabah****PT. XYZ****Laporan Perkembangan Profil Penerimaan Nasabah****Bulan / Tahun:**

No	Profil		
		Provinsi	Jumlah
1.	Pengusaha (Wiraswasta)		
2.	Pegawai swasta		
3.	Pegawai bank		
4.	Ibu Rumah Tangga		
5.	Pegawai PVA		
6.	PEPS		
7.	Pengurus Parpol		
8.	PNS (Termasuk Pensiunan)		
9.	Profesional		
10.	Pengurus Yayasan		
11.	Pegawai BUMN/D		
12.	Korporasi/entitas		
13.	Polisi / Tentara		

FORMULIR NOMOR III.DK.10**Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Luar Negeri****PT. XYZ****Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Luar Negeri****Bulan / Tahun:**

No	Laporan	Jumlah	
		USD	IDR
1.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan		
2.	Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri		

Formulir Nomor: IV.DK.1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Wakil
Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai
Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka

Kepada Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan pencabutan izin Wakil Pialang Berjangka atas nama Sdr , mengingat yang bersangkutan berkedudukan sebagai Wakil Pialang Berjangka.

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang mengatur pencabutan izin Wakil Pialang Berjangka.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama
PT.

Nama Jelas & Tanda Tangan

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

BACHRUL CHAIRI

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUL CHAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan,



SRI HARIYATI